



STRATEGI PEMERATAAN PENDIDIKAN TINGGI DI KABUPATEN BINTAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING

Puji Lestari

Sekretariat Daerah, Kabupaten Bintan

e-Mail: pujibanaza79@gmail.com

Submit Tgl: 04-Juli-2026

Diterima Tgl: 05-Juli-2026

Diterbitkan Tgl: 06-Juli-2026

Abstract: *The purpose of this policy paper is to formulate policy recommendations to support equitable development, particularly in the higher education sector, through improving access, quality, and educational opportunities for the people of Bintan Regency. The scope of the research includes an analysis of higher education disparities influenced by geographical, economic, and socio-cultural factors, as well as their implications on human resource quality and regional economic development. This study employs a qualitative method with informants or sources as the main subjects. The analysis results show that the inequality in higher education is mainly caused by economic factors, namely economic growth that is not yet inclusive due to gaps in income distribution and economic access among community groups. This condition causes the majority of the local population to have only a secondary education, while quality job positions in the Galang Batang Special Economic Zone (SEZ) and Lagoi SEZ are dominated by workers from outside the region. This policy paper recommends revising the Bintan Regent Regulation Number 57 of 2023 concerning the Provision of Educational Scholarships. The scholarship scheme is proposed to be changed from merit-based to need-based, with recipient criteria based on the Integrated Social Welfare Data (DTKS) and using a full scholarship system. This policy aims to increase fair and inclusive access to higher education, strengthen the quality of local human resources, and support more equitable economic growth in Bintan Regency.*

Keywords: *Higher Education; Bintan Regency; Scholarship; Human Resources.*

Abstrak : Tujuan *policy paper* ini adalah merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mendukung pemerataan pembangunan, khususnya di sektor pendidikan tinggi, melalui peningkatan akses, kualitas, dan kesempatan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Bintan. Ruang lingkup penelitian mencakup analisis ketimpangan pendidikan tinggi yang dipengaruhi oleh faktor geografis, ekonomi, dan sosial-budaya, serta implikasinya terhadap kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan informan atau narasumber sebagai subjek utama. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan tinggi terutama disebabkan oleh faktor ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif akibat kesenjangan distribusi pendapatan dan akses ekonomi antar-kelompok masyarakat. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar masyarakat lokal hanya memiliki pendidikan menengah, sementara posisi kerja berkualitas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang dan KEK Lagoi didominasi tenaga kerja dari luar daerah. *Policy paper* ini merekomendasikan revisi Peraturan Bupati Bintan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan. Skema beasiswa diusulkan diubah dari merit-based menjadi need-based, dengan kriteria penerima berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menggunakan sistem full scholarship (beasiswa penuh). Kebijakan

ini bertujuan meningkatkan akses pendidikan tinggi secara adil dan inklusif, memperkuat kualitas sumber daya manusia lokal, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Kabupaten Bintan.

Kata kunci: Pendidikan Tinggi; Kabupaten Bintan; Beasiswa; Sumber Daya Manusia

Cara mengutip Lestari, P. (2026). Strategi Pemerataan Pendidikan Tinggi di Kabupaten Bintan untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 1574–1595. <https://doi.org/10.71456/sur.v4i2.1961>

PENDAHULUAN

Kabupaten Bintan merupakan sebuah wilayah administrasi yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau. Cakupan wilayah Kabupaten Bintan meliputi 10.332.266,24 hektare, dengan 132.682,74 hektare atau sekitar 1,28 persen wilayah daratan dan 10.199.583,5 hektare atau sekitar 98,71 % wilayah perairan. Secara geografis, Kabupaten Bintan terdiri atas 240 pulau, dengan 39 pulau di antaranya telah berpenghuni. Pulau-pulau yang tidak berpenghuni sebagian besar telah dioptimalkan untuk sektor pertanian dan perkebunan. Sebagai pusat orientasi kebijakan dan pemerintahan, ibu kota kabupaten ditetapkan di Bandar Seri Bentan, Kecamatan Teluk Bintan. Secara administratif, wilayah ini terbagi ke dalam 10 kecamatan serta 51 desa dan kelurahan.

Kabupaten Bintan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi regional di Provinsi Kepulauan Riau dan Sumatera, terutama karena letaknya yang berdekatan dengan negara Singapura dan Malaysia, menjadikannya sebagai pintu gerbang perdagangan internasional yang mempercepat arus barang dan investasi. Keunggulan geografis ini didukung oleh pengembangan kawasan industri Pemerintah Kabupaten Bintan mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang sebagai pusat industri manufaktur terintegrasi dengan pelabuhan logistik internasional, dengan luas $\pm$ 2.000–3.000 hektar dan menarik $\pm$ 15–25 perusahaan investor domestik maupun asing. KEK ini diperkirakan menyerap $\pm$ 10.000–15.000 tenaga kerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah, penguatan infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia.

Selain itu, potensi pariwisata yang besar dikawasan Lagoi telah dikembangkan menjadi kawasan pariwisata dengan skala internasional dan menjadi bagian dari kawasan ekonomi khusus pariwisata, Kawasan pariwisata Lagoi menawarkan keindahan pantai, resort kelas dunia, dan fasilitas wisata terpadu yang menarik wisatawan domestik maupun internasional. Lokasinya yang strategis di dekat jalur pelayaran internasional memudahkan akses bagi turis dari Singapura, Malaysia, dan negara-negara Asia lainnya.

Pengembangan kawasan Lagoi sebagai KEK pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan. Investasi di sektor hotel, resort, restoran, dan rekreasi wisata mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan ribuan lapangan kerja di sektor jasa dan pariwisata. Selain itu, keberadaan KEK Lagoi meningkatkan aktivitas ekonomi di sektor pendukung seperti transportasi, UMKM, dan perdagangan lokal. Dengan demikian, KEK Lagoi tidak hanya menjadi pusat destinasi wisata kelas internasional, tetapi juga motor penggerak ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat daya saing Kabupaten Bintan di

Provinsi Kepulauan Riau. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan dibandingkan dengan Kabupaten /Kota lain di provinsi kepulauan riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1. Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 -2024

Kabupaten /Kota	2022	2023	2024	2025
Karimun	4,38	5,5	6,45	5,44
Bintan	7,66	8,32	8,89	6,43
Natuna	0,11	0,85	-3,57	10,49
Lingga	3,74	4,3	4,42	3,53
Kepulauan Anambas	0,09	0,62	-5,67	15,54
Kota Batam	6,84	7,04	6,69	6,76
Kota Tanjungpinang	4,12	4,92	3,78	3,31
Kepulauan Riau	5,06	5,16	5,02	6,94

Sumber data: BPS Kabupaten Bintan Tahun 2026

Meskipun Kabupaten Bintan memiliki potensi ekonomi yang besar melalui KEK Galang Batang dan KEK Lagoi, daya saing sumber daya manusia lokal masih terbatas. Rata-rata pendidikan tenaga kerja di Bintan setara D1 atau SMA, sehingga sebagian besar posisi dengan keterampilan tinggi dan manajerial masih diisi tenaga kerja dari luar daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa, meskipun lapangan pekerjaan tercipta secara signifikan, masyarakat lokal perlu meningkatkan kompetensi melalui pendidikan tinggi agar mampu bersaing dan mengisi posisi kerja berkualitas yang tersedia di kedua kawasan ekonomi tersebut.

Berdasarkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bintan, yang mencerminkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat. Meskipun ekonomi Bintan tumbuh melalui KEK Galang Batang dan KEK pariwisata Lagoi, nilai IPM menunjukkan adanya kesenjangan dalam pendidikan dan keterampilan, terlihat dari angka lama sekolah dan angka harapan sekolah yang masih relatif rendah, sehingga sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan dalam memanfaatkan peluang kerja berkualitas.

Tabel 1. 2. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bintan Tahun 2020-2025

Komponen IPM	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Angka Harapan Hidup	74,38	74,44	74,52	74,82	74,89	75,21
Harapan Lama Sekolah	13,1	13,26	13,27	13,44	13,45	13,46
Rata-Rata Lama Sekolah	8,44	8,67	8,7	8,92	9,15	9,45
Pengeluaran Per Kapita disesuaikan (ribu rupiah)	14.482	14.393	14.739	14.822	15.078	15.303
Bintan	76,04	76,48	76,8	77,5	77,96	78,65

Sumber data: BPS Kabupaten Bintan Tahun 2026

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bintan mengalami tren yang meningkat selama periode 2020 hingga 2025. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia yang digunakan untuk menggambarkan rata- rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dengan usia 15 tahun ke atas dalam mengenyam pendidikan formal (Wulandari & Sumarah, 2021). Pada tahun

2025, RLS Kabupaten Bintan berada pada angka 9,45. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia sekolah di Kabupaten Bintan dapat merasakan pendidikan formal selama 9 tahun atau setara dengan kelas 3 SMP.

Sedangkan Harapan Lama Sekolah merupakan indikator mencerminkan lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan akan dijalani oleh seorang anak pada usia tertentu di masa depan (Ginting & Lubis, 2023). Capaian Angka HLS menunjukkan jangka waktu yang diharapkan bagi penduduk usia sekolah di suatu daerah untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pada tahun 2025, harapan lama sekolah penduduk usia sekolah di Kabupaten Bintan berada di angka 13,46 tahun atau setara diploma I.

Kesenjangan sebesar 4 tahun ini menjadi bukti kuantitatif bahwa sistem pendidikan formal kehilangan banyak anak didik di tengah jalan (*stagnancy* lulus SMP) meskipun ekspektasi pendidikan masa depan (HLS) telah membidik jenjang perguruan tinggi/Diploma I. Ketimpangan ini berdampak langsung pada rendahnya daya saing SDM lokal di pasar kerja yaitu pertama ketidaksesuaian kualifikasi dimana kawasan ekonomi strategis seperti KEK Galang Batang dan KEK kawasan pariwisata Lagoi membutuhkan tenaga kerja ahli. Dengan profil masyarakat yang mayoritas hanya tamatan SMP, SDM lokal kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah.

Dampak yang kedua adalah marginalisasi pekerja lokal yang diakibatkan oleh keterbatasan ijazah, masyarakat tempatan cenderung terserap di sektor informal atau menjadi buruh kasar berupah rendah. Sementara posisi strategis dan manajerial diisi oleh pekerja luar. Selanjutnya risiko pertumbuhan yang tidak Inklusif, Jika kondisi ini dibiarkan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan yang tinggi tidak akan dinikmati oleh warganya sendiri, melainkan hanya menciptakan jurang pemisah antara kemajuan industri dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Berdasarkan data indikator sosial, potret partisipasi pendidikan penduduk kelompok usia 7–24 tahun menunjukkan struktur piramida pendidikan yang mengalami penyusutan signifikan pada jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi. Proporsi penduduk usia sekolah yang menempuh pendidikan SMA/ sederajat tercatat sebesar 14,62%, namun angka tersebut menurun tajam menjadi hanya 5,74% pada jenjang pendidikan tinggi (D1 hingga S2).

Tabel 1. 3. Persentase Partisipasi Pendidikan Menurut Umur 7-24 Tahun 2024

No	Partisipasi Pendidikan	Jumlah (%)
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah	0,63
2	Masih Sekolah	75,78
2.1	SD/MI/Sederajat	36,51
2.2	SMP/MTs/Sederajat	18,91
2.3	SMA/MA/SMK Sederajat	14,62
2.4	D I/II/III/IV/S1/2/3	5,74
3	Tidak Sekolah Lagi	23,59
	Jumlah	100

Sumber Data: BPS Kabupaten Bintan Tahun 2025

Penurunan drastis tersebut menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam akses pendidikan tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa transisi dari pendidikan menengah menuju pendidikan tinggi belum berjalan secara optimal. Perguruan tinggi belum sepenuhnya berfungsi sebagai ruang yang terbuka dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, melainkan cenderung menjadi jalur pendidikan yang lebih mudah diakses oleh kelompok masyarakat dengan dukungan modal ekonomi, sosial, dan akademik yang memadai.

Secara statistik, rasio partisipasi antara jenjang SMA dan pendidikan tinggi menunjukkan perbandingan sekitar 2,5 : 1. Artinya, dari setiap lima penduduk usia sekolah yang berada pada jenjang SMA/ sederajat, hanya sekitar dua orang yang mampu melanjutkan atau sedang menempuh pendidikan tinggi. Selisih partisipasi sebesar 8,88% tersebut mengindikasikan adanya penyusutan jumlah peserta didik yang cukup besar setelah menyelesaikan pendidikan menengah.

Fenomena ketimpangan pemerataan pendidikan tinggi tersebut menjadi isu utama dalam *policy paper* ini. Hal ini merefleksikan tantangan multidimensi yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bintan, yang berkaitan dengan keterbatasan ekonomi masyarakat, hambatan sosial-kultural, kondisi geografis wilayah kepulauan, serta rendahnya aksesibilitas terhadap layanan pendidikan tinggi. Tantangan tersebut semakin kompleks mengingat Kabupaten Bintan hingga saat ini belum memiliki perguruan tinggi sendiri, sehingga akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi masih bergantung pada daerah lain. Ketergantungan tersebut pada akhirnya berdampak pada lambatnya peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia lokal. *Kurt Lewin* menyatakan bahwa pendidikan tinggi memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendorong perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Namun, di berbagai negara berkembang seperti Indonesia, akses ke perguruan tinggi masih terkendala oleh masalah ekonomi, kurangnya informasi, dan terbatasnya dukungan dari lembaga terkait (Muhammadiyah et al., 2023).

Faktor Geografis dan aksesibilitas merupakan salah satu penyebab utama yang mempengaruhi ketimpangan pemerataan pendidikan tinggi yang terjadi di Kabupaten Bintan. Kondisi geografis yang tersebar dan terpisah oleh laut menyebabkan akses antar wilayah menjadi cukup sulit. Beberapa kecamatan di Kabupaten Bintan berada jauh dari pusat pemerintahan maupun pusat pendidikan. Kecamatan Tambelan misalnya, memiliki jarak sekitar 360 km dari ibu kota kabupaten, Bandar Seri Bentan. Jarak yang jauh ini membuat mobilitas masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi menjadi terbatas, terutama bagi masyarakat di wilayah pulau-pulau kecil dan daerah terpencil. Menurut (Nabila et al., 2024) Aksesibilitas Pendidikan di daerah terpencil kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam menyebabkan aksesibilitas pendidikan menjadi masalah besar di wilayah-wilayah terpencil.

Selain faktor jarak, aksesibilitas transportasi juga menjadi kendala utama. Sebagian wilayah hanya dapat dijangkau menggunakan transportasi laut dengan waktu tempuh yang relatif lama dan biaya yang cukup tinggi. Kondisi cuaca laut yang tidak menentu juga sering menghambat mobilitas masyarakat. Akibatnya, masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi harus pergi ke pusat kota seperti Tanjung Pinang atau bahkan ke Batam, karena fasilitas pendidikan tinggi di Kabupaten Bintan sendiri masih sangat terbatas.

Faktor ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif menjadi salah satu penyebab utama terjadinya ketimpangan pemerataan pendidikan tinggi di Kabupaten Bintan,

selain faktor demografi dan aksesibilitas wilayah. Bukti empiris mengenai belum inklusifnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan dapat dilihat dari adanya ketimpangan antara capaian indikator makro ekonomi daerah dan kondisi kesejahteraan sebagian masyarakat. Pada tahun 2025, Kabupaten Bintan mencatat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp110.473.740,00 per tahun, yang menunjukkan tingkat aktivitas ekonomi daerah relatif tinggi. Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari masih terdapatnya 8.110 jiwa penduduk miskin atau sebesar 4,77% dari total penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sebesar Rp528.549,00 per kapita per bulan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum terdistribusi secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, tingginya rata-rata pendapatan daerah belum secara otomatis mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan, melainkan mengindikasikan adanya ketimpangan distribusi pendapatan yang berpotensi memengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan tinggi. Menurut (Wiza, 2023). Tingkat PDRB Perkapita merupakan salah satu penyebab terjadinya disparitas pendapatan. PDRB Perkapita ini menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat perorangan.

Ketimpangan distribusi pendapatan tersebut menyebabkan adanya perbedaan kemampuan ekonomi antar kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Kelompok masyarakat dengan akses ekonomi yang lebih baik cenderung memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi, sedangkan masyarakat berpendapatan rendah menghadapi keterbatasan dalam membiayai kebutuhan pendidikan. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya akses sebagian kelompok masyarakat miskin terhadap pekerjaan tetap di sektor formal yang mampu memberikan pendapatan stabil dan jaminan ekonomi yang memadai. Akibatnya, kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi menjadi tidak merata dan pada akhirnya mendorong terjadinya ketimpangan pemerataan pendidikan tinggi di Kabupaten Bintan.

Selain dinamika ekonomi yang belum inklusif, faktor sosial budaya juga berperan dalam mempertahankan ketimpangan pemerataan pendidikan tinggi di Kabupaten Bintan. Faktor ini memengaruhi cara pandang dan keputusan keluarga dalam menentukan prioritas pendidikan anak. Dalam praktiknya, akses terhadap pendidikan tinggi masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti status ekonomi, lokasi geografis, gender, dan latar belakang etnis. Diskriminasi gender dan etnis juga menjadi faktor penghambat. Di beberapa negara, perempuan dan kelompok minoritas masih menghadapi hambatan budaya dan struktural dalam mengakses pendidikan tinggi. Misalnya Sen (1999) mencatat bahwa di beberapa masyarakat patriarki, perempuan sering diprioritaskan untuk menikah daripada melanjutkan pendidikan tinggi (Nudin, 2025). Di sebagian masyarakat, pendidikan tinggi belum menjadi prioritas karena setelah lulus sekolah menengah, banyak anak lebih diarahkan untuk segera bekerja guna membantu ekonomi keluarga.

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dalam lingkungan keluarga juga memengaruhi pemahaman terhadap pentingnya pendidikan tinggi. Hal ini berdampak pada keterbatasan akses informasi mengenai beasiswa, perguruan tinggi, dan manfaat pendidikan tinggi. Kondisi tersebut diperkuat oleh indikator rata-rata lama sekolah Kabupaten Bintan yang berada pada kisaran 9,5 tahun, atau setara tingkat pendidikan kelas 1 SMA, yang menunjukkan bahwa secara umum masyarakat belum mencapai jenjang pendidikan tinggi.

Di sisi lain, terdapat kesenjangan dengan harapan lama sekolah yang lebih tinggi, yang menunjukkan masih adanya ruang besar untuk peningkatan akses pendidikan.

Dengan demikian, faktor sosial budaya tidak hanya memengaruhi rendahnya minat melanjutkan pendidikan tinggi, tetapi juga memperkuat ketimpangan akses antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemerataan pendidikan tinggi tidak hanya dapat dilakukan melalui beasiswa dan bantuan biaya pendidikan, tetapi juga perlu disertai peningkatan literasi pendidikan dan sosialisasi manfaat pendidikan tinggi di masyarakat. Menurut (Nudin, 2025) Untuk meningkatkan kesetaraan peluang pendidikan dan mobilitas sosial, beberapa strategi dapat diimplementasikan yaitu melalui Program Beasiswa dan Bantuan Keuangan.

Identifikasi Masalah

Mengacu pada berbagai fenomena kesenjangan atau gap yang telah diuraikan di atas, isu ketimpangan pemerataan pendidikan tinggi di Kabupaten Bintan disebabkan oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

1. Faktor Geografis dan Aksesibilitas
2. Faktor Ekonomi (pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif)
3. Faktor sosial budaya

Rumusan Masalah

Menurut (Hasan Karbila, 2025), penentuan masalah yang menjadi prioritas utama untuk dijadikan fokus pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode *need assessment*. Metode ini dilakukan melalui pemberian peringkat atau *ranking* dengan skor 1 sampai 5 pada setiap uraian permasalahan berdasarkan *Urgency* (tingkat kemendesakan), *Seriousness* (tingkat kegawatan isu) dan *Growth* (tingkat perkembangan isu). Selanjutnya dilakukan perhitungan terhadap total skor dari setiap uraian permasalahan yang telah dinilai. Permasalahan yang memperoleh jumlah skor tertinggi ditetapkan sebagai masalah prioritas untuk dibahas lebih lanjut. Adapun hasil analisis data dengan menggunakan pendekatan *need assessment* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 4. Matrik USG Penentuan Masalah Spesifik Prioritas

NO	KRITERIA	URGENCY	SERIOUSNESS	GROWTH	TOTAL
1	Faktor Geografis dan Aksesibilitas	4	3	4	11
2	Faktor Ekonomi (pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif)	5	4	5	14
3	Faktor sosial budaya	4	4	3	11

Sumber data: Data diolah Tahun 2026

Merujuk pada tabel diatas, masalah prioritas dan sekaligus menjadi problem statemennya faktor ekonomi dalam hal ini pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif karena adanya ketimpangan distribusi pendapatan dan akses ekonomi yang disebabkan oleh kesenjangan pendapatan antar-kelompok masyarakat sehingga menimbulkan ketimpangan pemerataan pendidikan tinggi di Kabupaten Bintan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan *Policy Paper* ini untuk merumuskan rekomendasi yang komprehensif guna mendukung pemerataan pembangunan khususnya disektor pendidikan tinggi melalui peningkatan akses, kualitas, dan kesempatan pendidikan yang lebih merata bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia lokal yang berkualitas, kompetitif, dan mampu berdaya saing dalam menghadapi perkembangan global serta kebutuhan pembangunan daerah di Kabupaten Bintan.

METODE PENELITIAN

Kerangka teoritis

Pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa secara luas, dengan menghasilkan tenaga-tenaga yang terampil dan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan untuk pembangunan. Proses pendidikan sebenarnya adalah proses pemberdayaan untuk mengembangkan potensi manusia sebagai individu yang dapat memberikan sumbangan bagi masyarakat dan bangsanya. Menurut (Sahira, 2022) pendidikan adalah usaha manusia untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi pembawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan.

Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk masa depan individu maupun masyarakat karena menjadi salah satu instrumen utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan tinggi, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri serta membuka peluang mobilitas sosial yang lebih baik.

Pemerataan pendidikan menjadi faktor penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Namun demikian, akses terhadap pendidikan tinggi masih menjadi tantangan bagi sebagian kelompok masyarakat, terutama mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah. Pemerataan pendidikan di Indonesia adalah isu penting dalam pembangunan pendidikan. Isu perluasan akses pendidikan dan pemerataan pendidikan kerap menjadi tantangan. Pemerataan pendidikan adalah kondisi yang serupa antara penyelenggaraan pendidikan di kota dan di desa, sedangkan pemekaran ditandai dengan kemudahan masyarakat memperoleh pendidikan (Sahira, 2022).

Pendidikan bagi daerah terpencil adalah usaha untuk menyediakan layanan pendidikan yang ditargetkan pada lokasi-lokasi yang sulit dijangkau secara geografis, seperti daerah pedalaman, pegunungan, pulau kecil, dan area perbatasan. Tempat-tempat ini sering kali menghadapi berbagai rintangan, seperti minimnya infrastruktur, akses transportasi yang sulit, kekurangan tenaga pendidik, dan kurangnya sarana belajar yang memadai. Selain itu kesenjangan juga terjadi dalam hal aksesibilitas pendidikan. Di daerah terpencil atau terisolasi sulit untuk mengakses sekolah karena jarak yang jauh atau infrastruktur yang tidak memadai (Wany Nurhani et al., 2025).

Keberhasilan pembangunan pada suatu daerah dapat dilihat melalui indikator pertumbuhan ekonomi.. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi di suatu wilayah, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan memberikan tambahan penghasilan di wilayah tersebut diperiode tertentu (Harsono & Sutanto, 2024).

Pembangunan ekonomi berkelanjutan menjadi hal penting bagi negara berkembang seperti Indonesia. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan kualitas hidup masyarakat secara merata. Konsep pertumbuhan inklusif menekankan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan bersama, sehingga kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dapat berkurang.

Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan buah dari munculnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang telah lama tercantum dalam kesepakatan global mengenai *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Pertumbuhan ekonomi inklusif yaitu pertumbuhan ekonomi yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, menciptakan pemerataan, serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan indikator kemajuan ekonomi yang tak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan, melainkan juga mengurangi kemiskinan, meningkatkan pemerataan pendapatan, dan memperluas kesempatan kerja (Afriyana et al., 2023).

Pemerataan pendapatan adalah suatu keadaan di mana seluruh masyarakat yang tinggal di suatu wilayah dapat merasakan kesejahteraan untuk hidupnya. Pencapaian pertumbuhan ekonomi tidak dapat mengatasi masalah kesenjangan pendapatan karena belum meratanya distribusi pendapatan. Tidak meratanya proses pembangunan di sebabkan karena adanya wilayah-wilayah yang mengalami pertumbuhan yang cepat, dan beberapa wilayah lainnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat (Afini, 2020).

Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan mobilitas sosial, sehingga setiap individu perlu memperoleh kesempatan yang setara tanpa dipengaruhi oleh latar belakang sosialnya. Latar belakang sosial seseorang, yang mencakup faktor ekonomi, budaya, dan lingkungan, seringkali menentukan sejauh mana individu dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. (Fukaro, 2025).

Beasiswa telah menjadi instrumen penting dalam memberikan kesempatan belajar bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu secara finansial namun memiliki potensi akademik yang baik (Amadi et al., 2023)

Kerangka Konseptual

Dugaan awal dalam penelitian ini adalah bahwa faktor ekonomi dalam hal ini pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif karena adanya ketimpangan distribusi pendapatan dan akses ekonomi yang disebabkan oleh kesenjangan pendapatan antar-kelompok masyarakat sehingga menimbulkan ketimpangan pemerataan pendidikan tinggi di Kabupaten Bintan. Berdasarkan identifikasi masalah dan rumusan masalah di atas, maka kerangka berpikir konseptual dalam penulisan *policy paper* yang disusun dalam bentuk pohon masalah adalah sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Pohon Masalah Penulisan Policy Paper

Metodologi Penelitian

Policy Paper ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Fiqih ; Wardhana1, 2025) penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mengeksplorasi dan juga memahami arti makna di beberapa individu atau kelompok terkait suatu permasalahan sosial. Metodologi penelitian kualitatif digunakan dalam menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau objek suatu penelitian melalui interaksi sosial, persepsi individu dan kelompok. Subjek dalam metode kualitatif biasa di sebut sebagai narasumber atau informan yang merupakan pihak pemberi informasi terkait data-data dan informasi yang diperlukan oleh penulis.

Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan metode yang memilih sampel sesuai dengan kriteria yang dikehendaki dan berdasarkan pertimbangan tertentu (Zaviera Azzahra et al., 2021). Informan yang dipilih adalah mereka yang memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang kesejahteraan masyarakat khususnya pejabat atau staf dari organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan kemiskinan dan kesejahteraan kemasyarakatan. Informan terdiri dari 4 yaitu : 1) Akademisi, 2). Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan, 3). Perencana Muda Sekretariat Daerah 4). Analis Kebijakan Dinas Sosial.

Sumber data meliputi data primer hasil wawancara dengan sejumlah narasumber dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen yang relevan. Data ini dianalisis secara kualitatif deskriptif. Untuk menjamin Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan dokumen yang dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dari berbagai informan dengan dokumen resmi yang relevan untuk menguji keabsahan dan konsistensi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pendidikan termasuk kewenangan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk menyusun kebijakan pendidikan sesuai kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing guna meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas pendidikan nasional sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan di setiap daerah. Menurut Fred R. David (2009: 37) dalam(Delvia Okvianti et al., 2024) dijelaskan bahwa manajemen strategi terdiri dari tiga tahap yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Manajemen strategi berfokus pada penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Strategi pemerintah daerah dapat diukur melalui tiga tahap tersebut.

Perumusan Strategi

Peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu upaya penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) lokal yang berdaya saing di Kabupaten Bintan. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai pelayanan dasar bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta kualitas generasi muda agar mampu menghadapi perkembangan ekonomi dan persaingan kerja.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Bintan terhadap pembangunan kualitas SDM tercermin dalam visi Kabupaten Bintan Tahun 2025–2029, yaitu “Bintan Juara Menuju Masyarakat yang Maju, Berdaya Saing, Inovatif dan Sejahtera.” Visi tersebut didukung oleh salah satu misi daerah, yaitu “Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera Berlandaskan pada Nilai Religius dan Budaya Melayu.” Misi ini memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Bintan yang memiliki kualitas tinggi dalam aspek pendidikan, keterampilan, dan moralitas. Pembangunan sumber daya manusia yang unggul merupakan bagian dari upaya untuk menyiapkan individu yang kompetitif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan global serta meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Arah kebijakan dalam mendukung misi tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah strategis yang saling berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Bintan yaitu Pertama, pemerintah daerah memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran kepada masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan rentan sebagai upaya mengurangi kesenjangan sosial serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Kedua, peningkatan akses bantuan pendidikan dan beasiswa terus diperluas agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Hal ini menjadi langkah penting dalam menciptakan SDM yang berpendidikan dan berdaya saing. Ketiga, pemerintah juga berupaya melakukan pemenuhan dan pemerataan tenaga. Keempat, revitalisasi asrama mahasiswa Bintan di berbagai wilayah menjadi bagian dari upaya mendukung akses pendidikan tinggi, terutama bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka dapat menempuh pendidikan dengan lebih baik dan nyaman.

Salah satu wujud konkret Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pemberian beasiswa bagi masyarakat di Kabupaten Bintan. Kebijakan ini tertuang pada Peraturan Bupati Bintan nomor 57 Tahun 2023 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Kabupaten Bintan. Pemberian beasiswa bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan peserta didik tidak melanjutkan pendidikan dan/atau putus pendidikan akibat persoalan biaya pendidikan dan meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Terdapat dua jenis beasiswa pendidikan Diploma 1 (D1), yaitu beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi di bidang akademik dan non akademik. Beasiswa ini merupakan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang memiliki prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Prestasi non akademik tersebut meliputi bidang keagamaan, olahraga, seni, budaya, serta minat dan bakat. Jenis penerima beasiswa yang kedua adalah beasiswa pendidikan Strata-1 (S1) yaitu bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik.

Syarat utama bagi penerima beasiswa pendidikan di atas adalah masyarakat Kabupaten Bintan yang memiliki Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk Daerah dan memenuhi kriteria sebagai penerima beasiswa. Kriteria penerima beasiswa pendidikan D1 adalah Pertama, peserta didik yang meraih prestasi pada peringkat kesatu, kedua dan ketiga di bidang akademik dan non akademik baik tingkat internasional, nasional, provinsi atau kabupaten pada bidang akademik yang dibuktikan dengan sertifikat. Kedua, peserta didik yang telah lulus jenjang pendidikan menengah dan akan melanjutkan pendidikan tinggi di bidang pariwisata dan yang ketiga ialah peserta didik yang berprestasi paling lama tiga tahun sebelum pengajuan permohonan beasiswa.

Selanjutnya kriteria untuk penerima beasiswa S1 adalah Pertama, mahasiswa yang mengikuti pendidikan tinggi paling sedikit berada pada semester 3 (tiga) dan berprestasi akademik pada jenjang pendidikan tinggi dan Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan maksimal untuk 2 (dua) tahun ajaran pendidikan. Persyaratan umum calon penerima beasiswa adalah Penduduk Kabupaten Bintan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), mengajukan permohonan ke Bupati Bintan melalui unit penyelenggara program beasiswa disertai dengan materai, mengisi surat pernyataan yang menyatakan akan terus berprestasi dan tidak sedang menerima beasiswa pendidikan dari pihak mana pun, menandatangani pakta integritas yang penggunaan dana beasiswa dan mengisi formulir pendaftaran online dan mengunggah persyaratan tersebut dan mengirimkan berkas *hardcopy* ke unit penyelenggara.

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh calon penerima beasiswa D1 adalah Lulus jenjang pendidikan menengah maksimal satu tahun kelulusan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil Ujian, Memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian dengan nilai rata-rata paling rendah 77 (tujuh puluh tujuh), Untuk beasiswa prestasi bidang non-akademik menunjukkan bukti prestasi sertifikat penghargaan pada saat mengikuti jenjang pendidikan menengah. Sedangkan untuk jenjang S1 adalah Memiliki prestasi akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 3,00 untuk mahasiswa dengan program pendidikan/ jurusan eksakta/ sains dan 3,20 untuk mahasiswa dengan program pendidikan/ jurusan non-eksakta/ sosial, Menunjukkan Kartu Hasil Studi (KHS), Menunjukkan Surat Keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi, proposal dengan melampirkan fotocopi KTP, KK, KTM, Surat keterangan aktif kuliah asli, Tangkapan layar IPK dari situs Website Pddikti dan Tangkapan layar keaktifan kuliah dari Pddikti.

Impelentasi Strategi

Pemerintah Kabupaten Bintan mulai menjalankan Program Beasiswa pendidikan pada tahun 2024 sebagai salah satu langkah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Pelaksanaan program ini berada di bawah koordinasi Sekretariat Daerah melalui bagian Kesejahteraan Rakyat, dengan sasaran mahasiswa yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik yang berasal dari wilayah kabupaten Bintan. Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pelaksanaan program beasiswa pendidikan di Kabupaten Bintan. Menurut (Widiyaningrum & Salsabila, 2024) sumber daya manusia tidak hanya mencakup kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan, tetapi juga perasaan dan dorongan yang berperan dalam keberhasilan suatu program.

Sumber Daya yang terlibat dalam program ini adalah Tim Verifikasi yang dipimpin oleh Bupati Bintan terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Bapperida, BKAD, dan Dinas Pendidikan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Bintan nomor 84 /I2024 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat kabupaten Bintan. Aplikasi Beasiswa Pendidikan yang dikelola oleh Diskominfo berperan penting dalam memudahkan mahasiswa mengakses informasi terkait pendaftaran dan pencairan dana beasiswa. Sumber daya lainnya adalah berkenaan dengan keuangan yang tentunya menjadi salah satu faktor utama yang memastikan keberlanjutan program beasiswa ini. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Tahun 2024 dan 2025 mengalokasikan anggaran yang sama sebesar Rp 2,75 miliar dengan rincian dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 2. 1. Pagu dan Realisasi Anggaran Beasiswa Pendidikan Kabupaten Bintan Tahun 2024 & 2025

Uraian	Besaran Beasiswa	Pagu Anggaran 2024,2025	Realisasi				Pagu Jumlah Penerima Beasiswa Sesuai	Realisasi	
			Tahun 2025	%	Tahun 2025	%		Tahun 2024	Tahun 2025
Beasiswa D1	25.000.000	1.275.000.000	175.000.000	13,73	425.000.000	33,33	51	7	17
Beasiswa S1	3.000.000	1.000.000.000	525.000.000	52,50	702.000.000	70,20	333	175	234
Total		2.275.000.000	700.000.000	30,77	1.127.000.000	49,54	384	182	251

Sumber data : SIPD Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, realisasi program beasiswa jenjang D1 maupun S1 pada Tahun 2024 dan 2025 masih tergolong dalam kategori capaian sangat rendah, meskipun pada Tahun 2025 menunjukkan kecenderungan peningkatan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya Tahun 2024 merupakan tahun awal pencairan program beasiswa sehingga informasi mengenai program tersebut belum tersosialisasikan secara optimal, terutama kepada masyarakat yang berada di wilayah kepulauan. Pada Tahun 2024, jumlah pendaftar program beasiswa jenjang D1 tercatat sebanyak 28 orang. Namun, setelah melalui proses verifikasi administrasi serta seleksi persyaratan umum dan teknis, hanya 8 orang yang dinyatakan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Dari jumlah tersebut, 1 orang penerima beasiswa mengundurkan diri sehingga jumlah penerima aktif berkurang menjadi 7 orang. Sementara itu, pada jenjang S1 terdapat 361 pendaftar, dengan 175 orang di antaranya dinyatakan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Sementara itu, pada Tahun 2025 terjadi peningkatan jumlah pendaftar pada kedua jenjang program beasiswa. Pada jenjang D1, jumlah pendaftar tercatat sebanyak 46 orang, dengan 17 orang di antaranya dinyatakan memenuhi persyaratan setelah melalui proses verifikasi administrasi dan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun pada jenjang S1, jumlah pendaftar mencapai 385 orang, dengan 234 orang dinyatakan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Rata-rata penyebab tidaklolos pada proses verifikasi disebabkan oleh ketidaksesuaian terhadap persyaratan administrasi yang telah ditetapkan, seperti pendaftar bukan merupakan warga Kabupaten Bintan, kesalahan dalam mengunggah berkas persyaratan, serta pendaftar telah menerima beasiswa selama dua kali berturut-turut.

Kegiatan penyaluran beasiswa pendidikan diploma 1 dan strata 1 dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan kegiatan penyaluran beasiswa sebagaimana dibentuk Proses verifikasi terhadap permohonan beasiswa ini harus dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Evaluasi Strategi

Kebijakan pemberian beasiswa pendidikan berprestasi pada jenjang Diploma I (D1) maupun Strata I (S1) dinilai telah mampu menjadi salah satu upaya dalam menjawab permasalahan rendahnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten

Bintan. Harapan lama sekolah yang berada pada angka 13,46 tahun menunjukkan bahwa anak-anak di Kabupaten Bintan rata-rata diharapkan dapat menempuh pendidikan hingga jenjang Diploma I (D1).

Implementasi kebijakan tersebut tercermin melalui program beasiswa pendidikan gratis jenjang D1 di bidang pariwisata, yang merupakan salah satu sektor utama penggerak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan. Program ini diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan daya saing untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di kawasan ekonomi khusus pariwisata Lagoi. Selain itu, program tersebut merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan *Batam Tourism Polytechnic* dalam rangka mendukung pengembangan sumber daya manusia yang selaras dengan kebutuhan sektor pariwisata daerah.

Ketimpangan dalam pemerataan pendidikan tinggi di Kabupaten Bintan pada dasarnya masih dipengaruhi oleh pola pertumbuhan ekonomi daerah yang belum inklusif. Meskipun secara makro nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan tergolong tinggi, ketimpangan distribusi pendapatan atau kesenjangan antar-kelompok masyarakat masih nyata. Hal ini tecermin dari adanya 4,77% penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, serta rendahnya angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bintan yang baru mencapai 8,9 tahun. Angka RLS ini mengindikasikan bahwa mayoritas penduduk usia produktif secara rata-rata hanya mampu menuntaskan pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) akibat kendala finansial terstruktur.

Kesenjangan pendapatan ini kemudian berwujud pada ketimpangan akses terhadap kebijakan afirmatif pemerintah seperti program beasiswa gratis jenjang Diploma I (D1) di *Batam Tourism Polytechnic*. Kebijakan ini menyisakan persoalan karena menerapkan syarat berbasis prestasi (*merit-based*) akademik dan non-akademik. Akibatnya, penerima beasiswa justru tersentralisasi pada kelompok masyarakat di wilayah pusat pertumbuhan seperti Bintan Timur dan Bintan Utara yang memiliki fasilitas pendidikan memadai sejak jenjang dasar. Sebaliknya, masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan kerap tereliminasi dari peluang ini karena keterbatasan sarana pendidikan membuat mereka kalah bersaing secara kualitas akademik sejak dini.

Selain masalah hulu pada ketimpangan capaian akademik, rendahnya realisasi penerima beasiswa ini juga dipicu oleh hambatan biaya personal (*hidden cost*). Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur *Batam Tourism Polytechnic*, faktor biaya hidup bulanan (*living cost*), biaya transportasi antar pulau, serta kebutuhan asrama menjadi barrier utama bagi masyarakat. Lokasi kampus yang berada di Kota Batam dengan indeks biaya hidup tinggi menjadi beban finansial yang sangat berat bagi struktur ekonomi keluarga menengah ke bawah di Bintan, sekalipun biaya kuliahnya sudah digratiskan.

Fenomena ini diperkuat oleh data hasil wawancara dengan Perencana Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang mencatat banyaknya calon mahasiswa yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi. Alasan seperti telah memperoleh pekerjaan atau tidak mendapatkan izin dari keluarga pada dasarnya berakar pada masalah ekonomi yang sama yaitu adanya tekanan bagi anak untuk segera masuk ke pasar kerja demi menopang ekonomi keluarga, ketimbang mengambil kesempatan kuliah yang masih membebankan biaya hidup tinggi. Akibatnya program beasiswa yang diniatkan untuk memutus rantai kemiskinan ini belum mampu terserap optimal oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Pemberian beasiswa Strata 1 (S1) bagi mahasiswa berprestasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal. Kebijakan ini diharapkan mampu melahirkan generasi yang kompeten dan memiliki daya saing tinggi sehingga dapat berkontribusi secara optimal terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang. Namun demikian, efektivitas implementasi program beasiswa tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural.

Rendahnya capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Bintan menunjukkan keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Hal ini tercermin dari proporsi masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang hanya berkisar 5,74%. Rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi tersebut secara langsung memengaruhi minimnya realisasi penyerapan program beasiswa jenjang S1 berbasis prestasi.

Secara konseptual, skema beasiswa yang berorientasi pada prestasi akademik (*merit-based*) cenderung mempersempit cakupan penerima manfaat karena hanya menyasar kelompok kecil masyarakat yang telah berhasil mengakses pendidikan tinggi. Dalam praktiknya, sebagian besar kelompok tersebut berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi relatif lebih mapan dan umumnya berdomisili di wilayah pusat pertumbuhan. Kondisi ini menyebabkan fungsi beasiswa mengalami pergeseran, dari instrumen peningkatan mobilitas sosial bagi kelompok rentan menjadi sekadar insentif bagi kelompok yang sejak awal telah memiliki kemampuan finansial untuk menempuh pendidikan tinggi. Akibatnya, masyarakat dari kelompok ekonomi kurang mampu tetap berada di luar jangkauan program, sehingga berpotensi memperlebar ketimpangan sosial dan pendidikan. Selain itu, keterbatasan jumlah calon penerima yang memenuhi persyaratan administratif maupun akademik juga menyebabkan kuota beasiswa S1 berprestasi kerap tidak terserap secara optimal.

Akibatnya, masyarakat dari kelompok ekonomi kurang mampu tetap berada di luar jangkauan program, sehingga berpotensi memperlebar ketimpangan sosial dan pendidikan. Selain itu, keterbatasan jumlah calon penerima yang memenuhi persyaratan administratif maupun akademik juga menyebabkan kuota beasiswa S1 berprestasi kerap tidak terserap secara optimal.

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Perencana Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menyatakan bahwa rendahnya realisasi penyerapan beasiswa jenjang S1 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu ketidaksesuaian status kependudukan calon penerima (bukan warga Kabupaten Bintan), ketidakmampuan memenuhi persyaratan akademik berupa standar minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), serta pengunduran diri peserta program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelompok masyarakat rentan pada dasarnya telah mengalami hambatan sejak tahap akses menuju pendidikan tinggi. Keterbatasan ekonomi menyebabkan sebagian masyarakat tidak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sehingga tidak dapat masuk ke dalam kelompok calon penerima beasiswa berbasis prestasi. Akibatnya, skema beasiswa yang mensyaratkan status sebagai mahasiswa aktif cenderung lebih mudah diakses oleh kelompok yang sejak awal memiliki kemampuan finansial untuk menempuh pendidikan tinggi.

Alternatif Kebijakan

Berdasarkan teori Fred R. David dalam (Sadiyah et al., 2024) menyatakan bahwa pada tahap evaluasi ini formulasi strategi yang sudah diimplementasikan ditinjau, dengan

melihat faktor-faktor yang berpengaruh dalam melakukan evaluasi seperti faktor penghambat dalam implementasi strategi, mengukur kinerja strategi yang dijalankan dan mengambil langkah korektif jika terdapat hambatan dalam pengimplementasiannya. Langkah korektif terhadap hambatan dan kendala yang telah dianalisis pada dapat dirumuskan ke dalam beberapa alternatif kebijakan. Alternatif tersebut diharapkan mampu memberikan langkah perbaikan ke depan, sehingga kebijakan yang diambil menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam menentukan strategi selanjutnya.

Alternatif kebijakan pertama, meskipun Pemerintah Kabupaten Bintan saat ini telah menyediakan program beasiswa Diploma-1 (D1) di bidang pariwisata bagi lulusan SMA sederajat, program tersebut masih menerapkan skema *merit-based scholarship* yang eksklusif bagi siswa berprestasi akademik dan non-akademik. Akibatnya, kebijakan ini belum mampu menyentuh akar persoalan struktural di daerah, di mana sebagian besar lulusan tidak dapat melanjutkan pendidikan tinggi akibat keterbatasan pendapatan keluarga. Kondisi ini terkonfirmasi dari melebarnya kesenjangan antara Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 13,5 tahun dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang tertahan di angka 9,7 tahun. Ketimpangan ini dipertegas oleh rendahnya persentase partisipasi perguruan tinggi penduduk usia 7–24 tahun yang hanya mencapai 5,74%, sementara angka kemiskinan daerah masih berada di level 4,77%.

Guna memutus rantai kemiskinan antar generasi ini, Pemerintah Kabupaten Bintan perlu melakukan perubahan kebijakan menuju skema *need-based scholarship* dengan memasukkan kriteria kemiskinan berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara eksplisit dan menggunakan sistem *full scholarship* (beasiswa penuh). Beasiswa ini tidak hanya menanggung uang kuliah tunggal saja namun juga biaya hidup (*living cost*), biaya transportasi dan biaya dan biaya asrama.

Dalam pelaksanaannya, dinas pemangku program beasiswa harus berkoordinasi secara intensif dengan Dinas Sosial selaku pemilik otoritas data, serta dinas terkait lainnya. Langkah koordinasi lintas sektor ini krusial untuk memastikan proses verifikasi, validasi, dan sinkronisasi data berjalan akurat agar intervensi beasiswa tepat sasaran. Terakhir, dengan memanfaatkan ruang fiskal dari tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan, pemerintah daerah disarankan untuk menyediakan Beasiswa Penuh (*Full-Scholarship* dan *Living Cost*) demi menjamin keberlanjutan pendidikan masyarakat rentan.

Secara global, pendidikan terbukti menjadi instrumen strategis untuk menciptakan keadilan sosial dan memutus siklus kemiskinan antar generasi, terutama jika disertai kebijakan yang berpihak pada kelompok marginal (Rahawarin et al., 2025). Sedangkan (Li et al., 2015) menemukan bahwa kombinasi beasiswa berbasis kebutuhan dan prestasi secara signifikan menurunkan tingkat mahasiswa yang berhenti kuliah. program beasiswa pendidikan terbukti menjadi instrumen kebijakan yang efektif untuk menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan keberlanjutan studi, terutama bagi kelompok ekonomi rentan (Rahawarin et al., 2025).

Sebagai alternatif rekomendasi kebijakan kedua, Pemerintah Kabupaten Bintan perlu Menerapkan Skema Kemitraan Strategis melalui Kerja Sama Tripartit yang melibatkan tiga aktor utama: Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi penyelenggara program D1 Pariwisata, dan Sektor Industri (khususnya industri pariwisata, perhotelan, dan kawasan ekonomi di Bintan). Melalui skema ini, hubungan kerja sama tidak lagi bersifat kasual, melainkan dilembagakan melalui Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang

mengikat secara hukum. Dalam kemitraan ini, sektor industri di Kabupaten Bintan diwajibkan untuk memberikan kuota magang terstruktur serta prioritas penyerapan kerja (garansi kerja) bagi para lulusan penerima Beasiswa Afirmasi ini.

Sebagai timbal balik dan stimulasi bagi sektor swasta. Pemerintah Daerah dapat menawarkan insentif non-fiskal, seperti kemudahan layanan perizinan, atau mengintegrasikan program ini dengan pemenuhan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP/CSR). Kebijakan ini secara langsung akan memotong akar masalah rendahnya akses pekerjaan layak bagi kelompok miskin. Dengan adanya jaminan kerja pasca-kelulusan, program beasiswa ini tidak hanya menjadi instrumen pendidikan, melainkan sebuah strategi intervensi ekonomi yang transformatif untuk memaksa terjadinya mobilitas vertikal dan memutus total rantai kemiskinan struktural di Kabupaten Bintan.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan (Kharis & Hasan, 2020) menyatakan bahwa diterapkannya skema Tripartit ini didasarkan pada prinsip bahwa penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat harus melibatkan multi-sektoral yang berkepentingan dan memiliki komitmen tinggi, yaitu perusahaan, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah. Sinergi ketiga aktor ini mutlak diperlukan karena pengentasan kemiskinan struktural di Kabupaten Bintan tidak dapat diselesaikan melalui intervensi tunggal (*single-sector intervention*).

Pemerintah Daerah bertindak sebagai fasilitator regulasi dan fiskal, Perguruan Tinggi sebagai pencetak modal manusia (*human capital*), dan Perusahaan/Industri sebagai penyerap tenaga kerja riil. Melalui komitmen multi-sektoral yang dilembagakan ini, program Beasiswa Afirmasi D1 Pariwisata tidak hanya menjadi program bantuan sosial yang konsumtif, melainkan sebuah investasi pemberdayaan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

Alternatif rekomendasi kebijakan ketiga adalah penyusunan petunjuk teknis (Juknis) atau *Standard Operating Procedure* (SOP) yang disepakati bersama dalam forum Komite Tripartit. SOP ini mengatur secara rinci mekanisme verifikasi silang data DTKS, tata cara penyaluran dana biaya hidup (*living cost*) agar tidak terlambat, hingga mekanisme sanksi/insentif bagi industri pariwisata yang memberikan kuota magang dan penyerapan kerja. Juknis ini penting untuk menghindari kebuntuan birokrasi (*bureaucratic bottleneck*) pada tahap eksekusi di lapangan. SOP merupakan seperangkat instruksi proses kerja yang harus diikuti oleh setiap departemen di dalam perusahaan dan instansi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (Arief Priyodigdo et al., 2025).

Alternatif kebijakan keempat adalah menambahkan fitur masa sanggah pada aplikasi beasiswa pendidikan, sehingga mahasiswa dapat melakukan klarifikasi apabila terjadi kesalahan input data atau kegagalan sistem dalam membaca data. Mahasiswa yang merasa telah memenuhi persyaratan tetapi dinyatakan tidak lolos seleksi dapat mengunggah dokumen pembanding asli, seperti KHS resmi berstempel kampus atau surat keterangan aktif kuliah terbaru, sebagai dasar pengajuan keberatan terhadap hasil seleksi sistem. Kebijakan ini dapat membantu mengantisipasi dan meminimalkan komplain maupun demonstrasi mahasiswa ke kantor, karena seluruh proses keberatan diselesaikan secara resmi, transparan, dan terdokumentasi di dalam aplikasi. Selain itu, fitur masa sanggah juga berfungsi sebagai

jaring pengaman (*safety net*) bagi pemerintah daerah apabila terjadi kesalahan pada sistem penarikan data otomatis.

Beberapa alternatif kebijakan tersebut akan di pilih dengan mempertimbangkan enam komponen sebagaimana teori *William N. Dunn* yaitu efektivitas, efisiensi, responsivitas, kecukupan, perataan, dan ketepatan (Mandarlangi et al., 2024). Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan *need assessment* dengan menetapkan peringkat (ranking) dan pemberian skor pada rentang 1 hingga 10, berdasarkan tingkat urgensi dan prioritas kebutuhan. Proses penilaian ini diterapkan untuk memilih kebijakan terbaik dari lima alternatif kebijakan yang tersedia, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3. 1
Skoring kebijakan

NO	Kriteria	Efektif	Efisien	Responsivitas	Kecukupan	Perataan	Total
1	Merevisi Peraturan Bupati Bintan nomor 57 Tahun 2023 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Kabupaten Bintan jenjang D-1 dengan mengubah skema merit-based scholarship menjadi skema need-based scholarship dengan memasukkan kriteria kemiskinan berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta menggunakan sistem full scholarship (beasiswa penuh).	5	5	5	4	4	23
2	Pemerintah Kabupaten Bintan perlu Menerapkan Skema Kemitraan Strategis melalui Kerja Sama Tripartit	5	4	4	3	4	20
3	Penyusunan petunjuk teknis (Juknis) atau Standard Operating Procedure (SOP) tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Kabupaten Bintan	5	4	3	4	3	19
4	Menambahkan fitur masa sanggah pada aplikasi Beasiswa Pendidikan	4	4	3	4	4	19

Sumber data: Data diolah 2026

Berdasarkan tabel skoring dari delapan alternatif kebijakan di atas, maka penulis memilih alternatif kebijakan pertama yaitu penyusunan kebijakan berupa Merevisi Peraturan Bupati Bintan nomor 57 Tahun 2023 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Kabupaten Bintan dengan mengubah skema *merit-based scholarship* menjadi skema *need-based scholarship* dengan memasukkan kriteria kemiskinan berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta menggunakan sistem *full scholarship* (beasiswa penuh).

Mengacu pada teori evaluasi kebijakan *William N. Dunn*, transformasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Bintan melalui penambahan kriteria kemiskinan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan sebuah langkah korektif yang strategis. Reformasi ini secara radikal mengubah status program yang semula eksklusif berbasis capaian akademik (*merit-based*) menjadi inklusif berbasis kebutuhan riil masyarakat (*need-based*). Intervensi *zero-in* ini dirancang untuk memutus rantai kemiskinan struktural akibat pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah berupaya memangkas kesenjangan antara Harapan Lama Sekolah (13,5 tahun) dan Rata-Rata

Lama Sekolah (9,7 tahun) dengan cara menjamin keadilan akses bagi kelompok masyarakat rentan yang selama ini terpinggirkan dari roda ekonomi makro daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan beasiswa pendidikan Pemerintah Kabupaten Bintan masih menghadapi berbagai hambatan struktural, terutama karena penerapan skema merit-based scholarship yang belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan ketimpangan akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Kondisi tersebut tercermin dari masih lebarnya kesenjangan antara Harapan Lama Sekolah (13,5 tahun) dan Rata-Rata Lama Sekolah (9,7 tahun), rendahnya partisipasi pendidikan tinggi, serta masih adanya penduduk miskin sebesar 4,77 persen di tengah tingginya nilai PDRB per kapita daerah.

Dari beberapa alternatif kebijakan yang diusulkan, penulis merekomendasikan penyusunan kebijakan adalah melakukan revisi Peraturan Bupati Bintan Nomor 57 Tahun 2023 dengan mengubah skema beasiswa dari merit-based scholarship menjadi need-based scholarship berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta penerapan sistem full scholarship yang mencakup biaya pendidikan dan biaya pendukung lainnya pada jenjang Diploma 1. Dengan demikian, transformasi kebijakan beasiswa pendidikan di Kabupaten Bintan diharapkan mampu menciptakan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja bagi kelompok miskin, sehingga berdampak pada pemerataan distribusi pendapatan dan akses ekonomi masyarakat. Kebijakan ini menunjukkan bahwa permasalahan utama daerah bukan terletak pada rendahnya rata-rata pendapatan, melainkan pada ketimpangan distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui pembentukan sumber daya manusia (SDM) lokal yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi sesuai kebutuhan sektor industri dan pariwisata di Kabupaten Bintan.

Dengan demikian, transformasi kebijakan beasiswa pendidikan di Kabupaten Bintan diharapkan mampu menciptakan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja bagi kelompok miskin, sehingga berdampak pada pemerataan distribusi pendapatan dan akses ekonomi masyarakat. Kebijakan ini menunjukkan bahwa permasalahan utama daerah bukan terletak pada rendahnya rata-rata pendapatan, melainkan pada ketimpangan distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui pembentukan sumber daya manusia (SDM) lokal yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi sesuai kebutuhan sektor industri dan pariwisata di Kabupaten Bintan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afini, N. (2020). Pengaruh PDRB Perkapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pemerataan Pendapatan di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 44–48. <https://doi.org/10.33005/jdep.v2i2.90>
- Afriyana, L., Salmah, E., Sriningsih, S., Harsono, I., & Kunci, K. (2023). *Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2021* (Vol. 5, Number 1).
- Amadi, A. S. M., Hasan, S., Rifanto, N. A., Wildan, M., Afifah, N. Q., & Nisak, N. M. (2023). Upaya Pemerintah dalam Menjamin Hak Pendidikan untuk Seluruh Masyarakat di Indonesia: Sebuah Fakta yang Signifikan. *Educatio*, 18(1), 161–171. <https://doi.org/10.29408/edc.v18i1.14798>
- Arief Priyodigdo, A., Aquarini, & saipul. (2025). *Implementasi Standar Operasional Prosedur Untuk Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik: Studi Kasus Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah*. <https://doi.org/https://doi.org/10.33084/anterior.v24iSpecial-1.9110>
- Delvia Okvianti, Atthahara, H., & Azijah, D. N. (2024). Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam Mewujudkan Pendidikan Bermutu Melalui Beasiswa Karawang Cerdas. *Journal of Government Insight*, 4(2), 59–66. <https://doi.org/10.47030/jgi.v4i2.792>
- Fiqih, M., & Wardhana¹, S. (2025). Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15351253>
- Fukaro, A. (2025). pengaruh latar belakang sosial terhadap pemertaan pendidikan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 1214–1220. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/rj.v7i2>
- Ginting, D. I., & Lubis, I. (2023). *Pengaruh Angka Harapan Hidup Dan Harapan Lama Sekolah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/bn.v6i2.3884>
- Harsono, I., & Sutanto, H. (2024). *Ikontribusi Infrastruktur Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Indonesia*. <Http://Journal.Unmasmataram.Ac.Id/Index.Php/Gara>
- Hasan Karbila, I. (2025). *Peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Ptkin) Dalam Pemerataan Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat Di Kalimantan Tengah in Jurnal Ilmiah Gema Perencana*. <https://doi.org/https://doi.org/10.61860/jigp.v3i2.150>
- Kharis, A., & Hasan, S. (2020). Model Kemitraan Perguruan Tinggi-Perusahaan Dan Pemerintah Dalam Bingkai Corporate Social Responsibility. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 16(1), 1–15. <https://doi.org/10.20414/jpk.v16i1.1104>
- Li, F., Mattei, A., & Mealli, F. (2015). Evaluating the causal effect of university grants on student dropout: Evidence from a regression discontinuity design using principal

- stratification. *Annals of Applied Statistics*, 9(4), 1906–1931.
<https://doi.org/10.1214/15-AOAS881>
- Mandarlangi, M. A., Kurnia, I., & Alamsyah, M. N. (2024). Evaluasi Kebijakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Kabupaten Parigi Moutong. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(3), 548–560.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntaximperatif.v5i3.442>
- Muhammadiyah, ud, Badrun Tamam, M., Wijanarko, T., Mahendika, D., Astarina Mas, I., Yufrinalis, M., & Setiadi, B. (2023). Memberdayakan Pemuda untuk Masa Depan yang Lebih Cerah: Memberikan Pendidikan, Bimbingan, Peluang Kerja, dan Dukungan Kesehatan Mental. In *Jurnal Pengabdian West Science* (Vol. 02, Number 05).
- Nabila, P., Fadila Tinendung, H., Kurniasih, L., Tazkia Efendi, M., Hasibuan, T., Yusnaldi, E., William Iskandar Ps, J. V, Baru, K., Percut Sei Tuan, K., & Deli Serdang, K. (2024). Pengaruh Kondisi Geografis Terhadap Pendidikan Dasar Di Indonesia: Studi Literatur Pada Pendidikan Sd/Mi. In *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi* (Vol. 9, Number 2). <http://journal.staidenpasar.ac.id/index.php/wb/issue/view/52>
- Nudin. (2025). Dampak Kesenjangan Akses Pendidikan Tinggi Terhadap Mobilitas Sosial. *Jurnal Mitra*, 2025, 23.1: 1-10., 23(1), 1–0.
<https://kopertais8.or.id/jurnal/index.php/jm/article/view/77>
- Rahawarin, B., Ahmad, M., & Rochimah, H. (2025). Efektivitas Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Dalam Mengurangi Siswa Putus Sekolah: Tinjauan Literatur. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 12(4), 1053–1067.
<https://doi.org/10.38048/jipcb.v12i4.5883>
- Sadiyah, H., Hamas, P., & Fanida, E. H. (2024). *Manajemen Strategi Melalui Aplikasi Wargaku... Manajemen Strategi Melalui Aplikasi Wargaku Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Surabaya*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v12n2.p421-434>
- Sahira. (2022). *Perencanaan Pemerataan Pendidikan di Pelosok Desa Sebagai Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*.
- Wany Nurhani, Sri Narti Rabrusun, & Edi Ahyani. (2025). Manajemen Pendidikan Untuk Daerah Terpencil: Perbandingan Strategi Pemerataan Akses di Indonesia dan Malaysia. *Eureka : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 111–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.33477/eureka.v3i2.11913>
- Widiyaningrum, W. Y., & Salsabila, F. (2024). Implementasi Program Beasiswa Ti Bupati (Besti) Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(4), 772–787.
<https://doi.org/https://doi.org/10.25157/moderat.v10i4.4444>

- Wiza, Y. (2023). Pengaruh PDRB perkapita terhadap disparitas pendapatan provinsi di Indonesia tahun 2017 - 2021 dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*, 1(2). <https://doi.org/10.30983/krigan.v1i2.7756>
- Wulandari, A. T., & Sumarah, J. (2021). Kluster Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah dengan K-Means. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 5(4), 1548. <https://doi.org/10.30865/mib.v5i4.3279>
- Zaviera Azzahra, P., Yuliansyah, Y., & Nauli, P. (2021). Pengaruh akuntabilitas dan budaya organisasi terhadap kinerja organisasi pada rumah sakit swasta kota Bandar Lampung. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 1(1), 43–54. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i1.236>